

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP
KEMAMPUAN MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS***

(Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN Di Indonesia Tahun 2015-2019)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



FRANS DIKA PERMANA

2017/17043043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2021

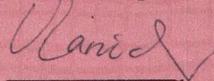
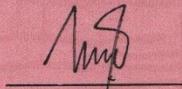
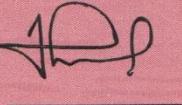
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP
KEMAMPUAN MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS***

Nama : Frans Dika Permana
NIM/TM : 17043043/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Auditing
Fakultas : Ekonomi

Padang, 24 Agustus 2021

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vanica Serly, SE, M.Si	
2	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	
3	Anggota	Henri Agustin, SE. Ak, M.Sc	

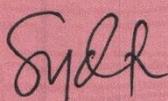
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP
KEMAMPUAN MEMPREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS***

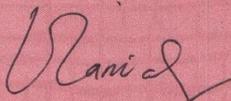
Nama : Frans Dika Permana
NIM/TM : 17043043/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Auditing
Fakultas : Ekonomi

Padang, 24 Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi


Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.
NIP. 19800103 200212 2 001

Disetujui oleh:
Pembimbing


Vanica Serly, SE, M.Si.
NIP. 19861229 201504 2 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frans Dika Permana
TM/NIM : 2017/17043043
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/ 23 April 1999
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Batang Kabung RT 05 RW 02 No.19
No. HP/Telp : 082288197412
Judul Skripsi :Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kemampuan Memprediksi *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan BUMN di Indonesia Tahun 2015 – 2019).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 24 Agustus 2021

Saya yang menyatakan



Frans Dika Permana
NIM. 17043043

ABSTRAK

Frans Dika Permana. (17043043/2017). **Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kemampuan Memprediksi *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Bumn Di Indonesia Tahun 2015 – 2019)**

Pembimbing : Vanica Serly, SE, M.Si

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kompetensi dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan dewan komisaris terhadap kemampuan memprediksi *financial distress*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan perusahaan BUMN di Indonesia yang terdaftar di Kementerian BUMN periode 2015–2019. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan metode pengambilan sampel diperoleh sampel sebanyak 175 perusahaan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menemukan bahwa komisaris independen, kompetensi dewan komisaris, dan frekuensi pertemuan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*.

Kata Kunci: Ukuran dewan komisaris, komisaris independen, kompetensi dewan komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, good governance, *financial distress*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberi rahmat, hidayah, ilmu, dan hikmah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Kemampuan Memprediksi *Financial Distress***". Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis kirimkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan rahmatan lil 'alamin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan S-1 dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan melatih pola berpikir ilmiah yang bisa menjadi nilai guna pada suatu hari nanti.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Vanica Serly, SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Henri Agustin, SE.Ak, M.Sc dan Ibu Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si selaku dosen penelaah dan penguji yang telah memberikan banyak saran dan membuat wawasan berpikir dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Sany Dwita, SE.Ak, M.Si, Ph.D, CA berserta jajaran pengurus Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang banyak membantu dalam proses Pendidikan ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan terutama Ibu Halmawati,SE, M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
5. Untuk orang tua saya, Ibu Salwati yang telah dengan sabar dan penuh perjuangan merawat saya dari kecil hingga sekarang bisa menyelesaikan studi di universitas ini. Untuk kakak saya yang selalu memberikan support baik secara moril ataupun material, dan keluarga besar anak dan cucu amak.
6. Teruntuk keluarga besar Purna dan Paskus Rajawali SMA N 7 Padang yang telah memberikan banyak pendidikan dan pengalaman berharga dalam hidup saya terutaman pribadi saya, terkhusus rekan saya Annisa Efendi yang telah banyak membantu selama proses kuliah hingga skripsi ini
7. Teman dan sahabat saya dari SMA (Khoris, Farhan, Ade dan Orlin) yang selalu mengisi waktu luang saya.
8. Teruntuk My Girl Friend Sheilla Rahmadani yang telah banyak memberikan support selama proses perkuliahan hingga akhir ini.
9. Teman kuliah HEUM (Hanny, Helin, Ime, Zeni, Calvin, Rijal, dan Andra) yang selalu jadi penolong dan backup serta nongki sampai liburan bareng.

10. Dan spesial Teman – teman yang lain Partai Trip Bungus (Naldi, Iz, Iik, dan Oja), Teman Partai Camp (Fira, Nesa, Atul dan Dhina) dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
11. Teman – teman kelas Akuntansi B 2017 yang telah berjuang Bersama dan semoga kalian sukses selalu.
12. Terakhir kepada keluarga besar IKBM 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis.

Padang, 24 Agustus 2021

Frans Dika Permana

NIM. 17043043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
BAB II.....	10
TINJAUAN TEORITIS	10
A. Kajian Teori	10
1. Agency Theory (Teori Keagenan).....	10
2. Prediksi Financial Distress	12
3. Good Corporate Governance	15
4. Dewan Komisaris	18
5. Ukuran Dewan Komisaris	20
6. Komisaris Independen	21
7. Kompetensi Dewan Komisaris	22
8. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Pengembangan Hipotesis	30
1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	30
2. Pengaruh Komisaris independen terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	31
3. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	32
4. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	34

D. Kerangka Konseptual	35
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Populasi dan Sampel	37
C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel	41
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
1. Uji Asumsi Klasik	46
2. Uji Kelayakan Model	48
BAB IV	50
HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Perusahaan BUMN	50
B. Deskripsi Variabel Penelitian	52
1. <i>Financial Distress</i>	53
2. Ukuran Dewan Komisaris	59
3. Komisaris Independen	65
4. Kompetensi Dewan Komisaris	70
5. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	76
C. Hasil Penelitian	81
D. Pembahasan	91
1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	91
2. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	93
3. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	95
4. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap Prediksi <i>Financial Distress</i>	96
5. Perkembangan Riset Good Corporate Governance pada perusahaan BUMN	98

BAB V.....	99
KESIMPULAN DAN SARAN.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Keterbatasan.....	100
C. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR TABEL

Tabel I. Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress	2
Tabel II. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III. Kriteria Pengambilan Sampel	38
Tabel IV. Sampel Penelitian	39
Tabel V. Nilai Cut Off Grover	42
Tabel VI. Jumlah Sampel Setelah Uji Outlier.....	53
Tabel VII. Nilai <i>Cut Off Grover</i>	54
Tabel VIII. Data <i>Financial Distress</i>	54
Tabel IX. Data Ukuran Dewan Komisaris	60
Tabel X. Data komisaris independen	65
Tabel XI. Data Kompetensi Dewan Komisaris.....	71
Tabel XII. Data Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	76
Tabel XIII. Regresi Linear Berganda.....	82
Tabel XIV. Uji Normalitas.....	84
Tabel XV. Uji Multikolinearitas	85
Tabel XVI. Uji Autokorelasi.....	87
Tabel XVII. Uji Koefisien Determinasi	88
Tabel XVIII. Uji Smultan F	89
Tabel XIX. Uji t – Test	90
Tabel XX. Pengujian Hipotesis.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Kerangka Konseptual.....	36
Gambar II Uji Heterokedastisitas.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persaingan bisnis yang ketat saat ini antar perusahaan telah mengarah pada sektor perekonomian yang sedang mengalami perubahan yang sangat cepat. Perusahaan dituntut dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika perusahaan belum siap menghadapinya maka penjualan perusahaan akan turun, dan selanjutnya akan berdampak terhadap laporan keuangan. Namun, biasanya perusahaan yang akan menghadapi persaingan ekonomi yang tidak siap terhadap kondisi saat ini, akhirnya dipaksa bubar karena masalah *financial distress* (Damayanti et al., 2017).

Prediksi financial distress merupakan kondisi dimana suatu perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan seperti risiko kebangkrutan yang biasanya dilakukan oleh pihak internal dan eksternal perusahaan (Loman & Kunci, 2015). Permulaan kebangkrutan pada perusahaan diawali dengan terjadinya *financial distress* sampai dinyatakan bahwa perusahaan tersebut pailit. Kebangkrutan kemungkinan masalah dalam perusahaan yang terjadi jika perusahaan dihadapi dalam situasi yang sulit, terdapat dua faktor yang mengarah pada kebangkrutan perusahaan yaitu internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu dari perspektif keuangan perusahaan yang terjadi saat kegagalan perusahaan tidak lagi mampu melunasi semua hutang dan

memenuhi kewajibannya. Sedangkan pada faktor eksternal yaitu masalah sumber daya perusahaan dan bahan baku, yang membuat perusahaan kehilangan kesempatan dalam produksi dan menghasilkan income (Ilmi et al., 2016).

Sementara itu, berdasarkan fenomena *financial distress* terdapat tujuh BUMN masuk kedalam pantauan Menteri BUMN yang mengalami kerugian dalam catatan lima tahun terakhir. Kementerian Keuangan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) periode tahun 2015 – 2019 telah banyak mengalokasikan PMN dengan total sebanyak 153,3 Triliun dan tambahan modal BUMN sebanyak 18,73 Triliun pada tahun 2020 yang dialokasikan dari uang pajak beberapa BUMN. Meskipun telah banyak dana yang disuntikan ke BUMN, tidak dapat menjamin bahwa peningkatan kinerja keuangan pada perusahaan membaik (Idris & Kompas.com, 2019). Serta menurut data kementerian BUMN pada tahun 2020 terdapat beberapa BUMN yang diprediksi mengalami *financial distress* dengan terlilit utang sebesar 1.682 Triliun (Suparjo. R, 2021).

Tabel I.
Perusahaan Yang Mengalami Financial Distress

No	Nama Perusahaan	Sektor	Tahun
1	PT Krakatau Steel (Persero)	Industri	2019
2	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Industri	2019
3	PT PAL Indonesia (Persero)	Industri	2019

4	PT Dok dan Kodja Bahari (Persero)	Industri	2019
5	PT Sang Hyang Seri (Persero)	Pertanian	2019
6	PT Pertani (Persero)	Pertanian	2019
7	Perum Bulog	Pangan	2019
8	PT Waskita Karya	Infrastruktur	2020
9	PT Perkebunan Nusantara III	Pertanian	2020
10	PT Kereta Api Indonesia	Transportasi	2020
11	PT Garuda Indonesia	Transportasi	2020

Good Corporate Governance yang merupakan tanggung jawab setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja manajemen dalam mengontrol praktek kecurangan didalam perusahaan, serta menentukan arah dan kendali kinerja perusahaan (Hartono & Nugrahanti, 2014). *Good Corporate Governance* gambaran dari sebuah perusahaan dalam menentukan bagaimana perusahaan mengawasi hak pemegang saham dan menentukan aturan dalam memilih anggota dewan komisaris berdasarkan kemampuan mereka (Mueller, 2018). *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hubungan antara berbagai pihak/stakeholders, terutama dalam arti sempit yaitu hubungan dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham untuk mencapai tujuan perusahaan (Susetyo & Ramdani, 2020).

Good Corporate Governance merupakan salah satu mekanisme dalam mengatasi terjadinya financial distress, karena dasar corporate governance adalah untuk menciptakan pengelolaan yang baik terhadap

perusahaan. Peningkatan pada kinerja perusahaan akan ditunjukkan pada laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, jika kinerja perusahaan lebih baik maka kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan akan lebih baik. Dengan kata lain, perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dari hasil aktivitas perusahaan (Putra & Serly, 2020).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 28 tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang menyatakan bahwa dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan Manajemen, kinerja secara keseluruhan emiten atau perusahaan publik pada umumnya dan memberi rekomendasi untuk dewan direksi. Menurut (Saleem et al., 2016) pemegang saham mengandalkan kemampuan dewan komisaris dalam memantau kinerja direksi. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kualitas laporan keuangan ada pada efektivitas karakteristik dewan komisaris.

Menurut (Setiawan, 2018) menjelaskan bahwa salah satu komponen penting dalam *Good Corporate Governance* adalah dewan komisaris. Dewan komisaris yang dengan kinerja baik dan efisien akan memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 pasal 28 menjelaskan bahwa dewan komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses pengawasan terhadap kinerja manajemen. Dengan adanya dewan komisaris sebagai salah satu mekanisme penting dalam *Good Corporate*

Governance untuk mencegah terjadinya *financial distress* yang nantinya akan bertanggung jawab kepada stakeholder sebagai pemilik perusahaan (Huljanna, 2019). Pada penelitian sebelumnya banyak menjelaskan tentang karakteristik dewan komisaris pada manajemen laba maka dari itu perlu adanya penelitian tentang karakteristik dewan komisaris terhadap *financial distress* yang juga berperan penting terhadap kelangsungan perusahaan.

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris, semakin kecil ukuran dewan komisaris maka semakin efektif karena jumlah anggota dewan komisaris yang banyak berdampak pada lamanya proses pengambilan keputusan (Setiawan, 2018). Semakin banyak komisaris independen didalam perusahaan dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya *financial distress* karena semakin banyak pihak independen yang mengawasi kinerja manajemen perusahaan (Cinantya & Merkusiwati, 2015). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 20 Nomor 1 bahwa dewan komisaris berjumlah paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

Komisaris independen adalah semua anggota dewan komisaris bekerja secara independen atau tidak berpihak kepada siapa pun, tidak mudah dipengaruhi dan berlaku secara adil terhadap masalah yang dihadapi perusahaan serta komisaris independen berperan penting terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris (Setiawan, 2018). Independensi ini bertujuan untuk memberikan pandangan objektif dan integritas dalam pelaporan serta rekomendasi dengan maksud lebih

adil dan tidak berpihak terhadap penyelesaian masalah (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002).

Kompetensi dewan komisaris adalah keterampilan akuntansi dan keuangan (*financial expertise*) akan menguntungkan dewan komisaris memahami laporan keuangan dan masalah internal laporan keuangan yang lebih baik. Selain itu, dewan komisaris dengan keahlian yang mumpuni dapat memahami dan memecahkan masalah laporan keuangan (Prastiti & Meiranto, 2013). Menurut (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*, 2017) kompetensi dapat dilihat dari pengalaman dewan komisaris dalam bidang industri yang pernah dijalankan sebelumnya.

Frekuensi pertemuan dewan komisaris berhubungan rapat dewan komisaris adalah hal penting terhadap efektivitas dewan komisaris dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan. Rapat dewan pengawas merupakan media komunikasi dan koordinasi kedua belah pihak saat anggota dewan komisaris menjalankan tugasnya pengawas manajemen. Pertemuan tersebut akan membahas arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diadopsi oleh manajemen, dan penyelesaian konflik kepentingan (Prastiti & Meiranto, 2013). Frekuensi rapat dewan komisaris yang dilakukan secara teratur dan terkontrol dengan baik mempunyai dampak positif dalam pengawasan serta penyampaian kritik terhadap kebijakan – kebijakan yang diambil manajemen (Zahra et al., 2016).

Berlandaskan hal tersebut penelitian ini mengacu pada fenomena diatas bahwa terdapat tujuh BUMN yang masih mencatatkan kerugian dari

tahun 2015 – 2019 walaupun telah banyak dana yang dialokasikan dari Penyertaan Modal Negara (PNM). Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang perusahaan BUMN dikarenakan sebagian besar dari laba BUMN untuk negara yang dapat dirasakan manfaat bagi masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putra & Serly, 2020) mengkaji tentang pengaruh komite audit terhadap *financial distress*, pada penelitian tersebut terdapat gap pada variabel independen. Oleh karena penulis tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “***Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan BUMN di Indonesia Tahun 2015 – 2019)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah ukuran dewan komisaris dapat memprediksi *financial distress*?
2. Apakah komisaris independen dapat memprediksi *financial distress*?
3. Apakah kompetensi dewan komisaris dapat memprediksi *financial distress*?
4. Apakah frekuensi pertemuan dewan komisaris dapat memprediksi *financial distress*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap prediksi *financial distress*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap prediksi *financial distress*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi dewan komisaris terhadap prediksi *financial distress*.
4. Untuk mengetahui pengaruh frekuensi pertemuan dewan komisaris terhadap prediksi *financial distress*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah literatur mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi *financial distress* serta juga dapat menjadi landasan atau acuan untuk penelitian yang akan datang.

2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pemahaman, informasi, dan referensi bagi penulis, akademis, perusahaan, dan penelitian selanjutnya

mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap *financial distress* dengan studi kasus pada perusahaan BUMN tahun 2015-20

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori Agensi menurut (Jensen & Meckling, 1976) adalah teori menjelaskan hubungan perjanjian antara *principal* dan *agent*. Hubungan yang dimaksud adalah komitmen kerja sama yang melibatkan *principal* (stakeholder) dan *agent* (manajemen) dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan (Zainuddin, 2019). Stakeholder atau *principal* merupakan pihak yang memberikan tugas kepada *agent* atau manajemen yang merupakan pihak yang diberikan tugas dalam menjalankan aktivitas perusahaan serta hubungan ini sering menimbulkan konflik antara kedua pihak yang saling berkepentingan yang disebut masalah keagenan atau agency (Chrissentia & Syarief, 2018).

Stakeholder merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada manajemen, perbedaan asimetri informasi membuat munculnya masalah agensi yang tidak dapat mengawasi setiap saat kinerja dari manajemen. pentingnya pengawasan (monitoring) untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (Andarini & Januarti, 2012). Stakeholder dan manajemen akan melakukan usaha untuk dapat meminimalisir biaya yang

dikeluarkan dari konflik keagenan, untuk mengawasi kinerja dari manajemen yang tidak bisa dilakukan stakeholder setiap saat, maka stakeholder memberikan wewenang kepada dewan komisaris (Akmyga & Mita, 2015).

Indikasi financial distress dalam perusahaan terpaksa membuat perusahaan harus mempunyai good governance yang baik. Principal dan agent harus saling berkomunikasi serta mempunyai control yang baik agar tidak ada konflik diantara keduanya dan dapat meningkatkan aset perusahaan. Terdapatnya control yang dilakukan stakeholder dapat meningkatkan kinerja serta meminimalkan terjadinya fraud dalam perusahaan (Bregiba et al., 2016). Kontrol yang dilakukan oleh stakeholder secara tidak langsung diberikan kepada dewan komisaris yang menjalankan wewenang serta mempunyai pengalaman independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh dewan komisaris yang dapat meminimalkan terjadinya kesalahan pada manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya akan menganalisis informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang diungkapkan oleh manajemen agak tidak terdapatnya keputusan yang berpihak sehingga mampu meminimalisir terjadinya *financial distress* dalam suatu perusahaan.

2. Prediksi Financial Distress

Prediksi financial distress adalah tahap kemerosotan kondisi keuangan perusahaan sebelum terjadinya *financial distress* dari gambaran status keuangan perusahaan di dalam laporan keuangan perusahaan (Loman & Kunci, 2015). Hal utama yang dapat dilihat dari *financial distress* adalah ketidakmampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya (Chrissentia & Syarief, 2018). Menurut (Ardian et al., 2016) *financial distress* merupakan aktivitas operasional perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan masalahnya adalah arus kas operasi tidak dapat dipenuhi Kewajiban perusahaan saat ini, seperti hutang dagang dan biaya bunga.

Menurut (Sulastri & Zannati, 2018) *Financial Distress* disebabkan oleh banyak faktor masalah internal, seperti arus kas yang stagnan dan kinerja perusahaan tidak memenuhi untuk membayar hutang perusahaan. Jumlah utang yang besar dalam mendanai aktivitas bisnis dan membuat perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk pembayaran di masa depan. Pada saat yang sama, kinerja perusahaan yang tidak baik membuat perusahaan akan mengalami kerugian operasional. Serta terjadinya penurunan pendapatan operasional

menyebabkan arus kas perusahaan menjadi negatif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan.

Menurut (Haziro & Negoro, 2017) fungsi informasi pada laporan keuangan jika terjadi *financial distress* dalam perusahaan adalah :

- a. Solusi tercepat yang dapat diambil manajemen untuk mencegah masalah yang terjadi sebelum bangkrut.
- b. Manajemen dapat mengambil tindakan take over atau merger agar perusahaan mampu untuk membayar kewajiban.
- c. Sebagai tanda peringatan dini bahwa akan terjadi kebangkrutan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hantono, 2019) dan (Nasri et al., 2018) dalam memprediksi terjadinya *financial distress* terdapat berbagai metode pengukuran seperti model Grover (1968) yang mengemukakan tiga rasio penting yang bisa dipercaya seperti asset, modal, dan laba. Pada model ini memiliki nilai akurasi 100% dalam memprediksi kondisi *financial distress*. Model Grover juga dianggap menarik untuk digunakan karena memiliki nilai akurasi yang lebih akurat yaitu 100% karena telah diuji di beberapa perusahaan dimana fokus pada rasio kinerja, modal kerja, dan laba sebelum pajak.

Namun pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode Grover seperti penelitian yang dilakukan oleh (Hantono, 2019) dan (Nasri et al., 2018) yang meneliti nilai akurasi pengukuran Grover dalam memprediksi *financial distress* yang terjadi pada perusahaan sub sektor perdagangan besar di bursa efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017 serta perusahaan sub sektor property dan real estate di BEI periode 2014 – 2018 dengan variabel yang digunakan adalah modal kerja, laba operasi dan laba sebelum pajak.

Adapun rumusnya sebagai berikut :

$$G = 1,650 X1 + 3,404 X2 - 0,016 X3 + 0,057$$

Dimana :

X_1 = Modal kerja/Total aset.

X_2 = Laba sebelum bunga dan pajak/Total aset.

X_3 = Laba bersih/Total asset (ROA).

Semakin pesat perkembangan dan tingkat persaingan pada perusahaan *financial distress* merupakan suatu masalah yang akan dihadapi dan menjadi tanggung jawab untuk dicegah (Masak & Noviyanti, 2019). *Financial distress* dapat terjadi karena ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dan membayarkan kewajibannya disebabkan tidak ada modal yang cukup untuk melanjutkan serta mengembangkan bisnisnya. Maka dari itu perusahaan harus

mampu mengelola agar tidak terdapat indikasi terjadinya atau masuk kedalam zona kebangkrutan sehingga kebutuhan dan aktivitas operasional dalam mencapai tujuan perusahaan untuk memperoleh laba (Ananto et al., 2017).

3. Good Corporate Governance

Menurut (Haziro & Negoro, 2017) *Good Corporate Governance* merupakan suatu aturan yang berlaku bagi perusahaan untuk mengatur dan mengontrol perusahaan guna menambah nilai bagi pemegangnya saham. Pada saat yang sama, Organization for Economics Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan GCG sebagai alat perusahaan guna menetapkan tujuan dan alat dalam mencapai tujuannya serta pengawasan pada perusahaan. Maka disimpulkan, GCG adalah seperangkat hukum atau peraturan wajib yang dilakukan untuk mengatur interaksi dari semua institusi perusahaan, termasuk manajer sampai kepada pemegang saham untuk merealisasikan keuntungan atau peningkatan nilai perusahaan guna menghindari resiko bisnis perusahaan dan resiko saat krisis global (Ferbienti et al., 2018).

Di dalam perusahaan, struktur GCG dibagi menjadi dua, yaitu struktur internal dan eksternal, struktur atau mekanisme internal merupakan unsur partisipasi langsung perusahaan

dalam kegiatan perusahaan seperti manajer, komisaris, dewan direksi serta perangkat yang ada di perusahaan. Sedangkan pada struktur eksternal adalah organisasi di luar perusahaan yang tidak terlibat langsung dengan aktivitas perusahaan, seperti peraturan / regulasi, kondisi ekonomi pasar modal dan lainnya (Ferbienti et al., 2018). Menurut (Ananto et al., 2017) bahwa *Organization Of Economics Cooperation and Development* (OECD) yang menjelaskan prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik adalah :

a. Fairness (Keadilan)

Prinsip ini menyatakan bahwa Good Corporate Governance harus melindungi hak investor mayoritas, minoritas, serta investor asing dan bertanggung jawab terhadap komitmen dengan investor.

b. Transparency (Transparansi)

Prinsip ini menjelaskan bahwa informasi harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses, jelas, tepat waktu, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi pengguna.

c. Akuntability (Dapat dipertanggung jawabkan)

Prinsip ini menjelaskan bahwa laporan keuangan yang disiapkan oleh perusahaan harus dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen, agar tidak ada masalah yang terjadi pada manajemen dan pemilik saham.

d. Responsibility (pertanggung jawaban)

Prinsip ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan cocok sebagai pedoman dalam evaluasi perusahaan, baik itu termasuk kategori patuh atau tidak.

Pada solusi di atas, inti dari sebuah *good governance* dapat terwujud hal tersebut, serta tercapainya pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan yang baik dalam arti transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Dapat dilihat dari informasi keuangan bahwa keadaan keuangan sedang baik disajikan oleh perusahaan, analisis laporan keuangan perusahaan yang benar – benar memenuhi situasi aktual. Maka untuk melihat kinerja dari sebuah perusahaan dengan baik dapat dilihat pada hasil kinerja dewan komisaris nya sebagai pengawas internal perusahaan tersebut (Susetyo & Ramdani, 2020). Penelitian yang dilakukan (Hassan Al-Tamimi, 2012) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan *good governance* lemah rentan terhadap penurunan ekonomi dan kesulitan keuangan. Maka, untuk memastikan *good governance* berjalan dengan baik sehingga perusahaan bisa mendapatkan sinyal kebangkrutan dari hasil kinerja dewan komisaris.

4. Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan komisaris adalah organ perusahaan bertanggung jawab atas pengawasan umum dan/atau khusus anggaran dasar perusahaan dan memberikan rekomendasi kepada direksi. Komisaris bersifat independen, mereka tidak berpartisipasi dalam pengendalian perusahaan dan mampu melaksanakan tugas secara objektif, semata-mata untuk kepentingannya perusahaan, terlepas dari pengaruh apapun mungkin bertentangan dengan kepentingan pihak lain.

Menurut (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2002), peran dewan komisaris sangat penting di dalam perusahaan, terutama dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris adalah inti dari *Good Corporate Governance* yang bertugas untuk memastikan penerapan strategi perusahaan, mengontrol manajemen mengelola perusahaan dan memberlakukan akuntabilitas. Dewan komisaris pada dasarnya adalah mekanisme untuk memantau dan memberikan arahan serta bimbingan manajemen perusahaan (Prastiti & Meiranto, 2013). Menurut (Hidayat & Utama, 2016) dalam sumber teori ketergantungan dewan komisaris memiliki peran untuk meningkatkan reputasi

perusahaan, membangun hubungan eksternal serta memberikan nasehat dan konsultasi pada manajemen.

Dalam struktur tata kelola perusahaan keberadaan dewan komisaris merupakan faktor penting untuk perbaikan kualitas pengendalian internal perusahaan. Pada dasarnya partisipasi dewan komisaris yang dirancang untuk memberikan perlindungan terbaik kepada stakeholder. Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 menetapkan aturan mengenai “Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris”. Berdasarkan aturan tersebut, dewan komisaris wajib dimiliki oleh perusahaan dengan beberapa karakteristik yaitu : 1) ukuran dewan komisaris atau jumlahnya minimal terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris dan satu di antaranya komisaris independen, 2) komisaris independen dilihat dari anggota yang tidak memiliki hubungan dengan manajemen dan berasal dari pihak luar serta menyatakan dirinya independen kepada RUPS, 3) frekuensi rapat dewan komisaris minimal dua kali dalam setahun yang harus dihadiri oleh seluruh anggota dewan komisaris (Otoritas Jasa Keuangan, 2014).

Dengan karakteristik tersebut, perusahaan harus teliti dalam memilih dewan komisaris, karena apabila salah satu dari karakteristik ini tidak sesuai aturan yang berlaku berakibat

pada hasil kinerja yang kurang memuaskan. Oleh karena itu, dewan komisaris yang berkualitas mampu menganalisis perusahaan yang mengalami *financial distress* atau tidak karena dewan komisaris akan melihat kondisi perusahaan melalui laporan keuangan yang disajikan setelah melakukan indentifikasi mendalam.

5. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut pedoman umum *Tata Kelola Perusahaan* di Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kompleksitas perusahaan dan fokus pada efektivitas pengambilan keputusan perusahaan. Di perusahaan, jumlah dewan komisaris berbeda-beda, menurut Peraturan OJK Nomor 33 tahun 2014 dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang. Jumlah dewan komisaris yang besar bisa menguntungkan perusahaan, misalnya dalam pertemuan antar dewan komisaris mungkin ada perbedaan pendapat antara dua pihak tersebut. Jika jumlah anggota dewan kurang dari jumlah anggota direksi dan membuat dewan komisaris mengalami tekanan psikologis. Sebab, jumlah anggota dewan komisaris harus lebih dari atau sama dengan jumlah anggota dewan direksi (Indrayati, 2010).

Ketidakseimbangan antara ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan direksi akan menyebabkan komisaris mengalami kesulitan dalam pembahasan bekerja sama dengan dewan direksi dan memantau kinerja perusahaan. Dewan komisaris akan cenderung menerapkan prinsip akuntansi konservatif mencegah perilaku abnormal direktur dan manajemen (Indrayati, 2010). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah dewan komisaris di perusahaan yang akan menganalisis informasi keuangan secara bersama-sama untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya, yang akan memudahkan perusahaan dalam mengatasi *financial distress*.

6. Komisaris Independen

Komisaris independen berperan penting dalam pengawasan dilakukan oleh dewan komisaris. Komisaris independen harus mengawasi secara efektif untuk meminimalkan kesalahan oleh manajemen (Setiawan, 2018). Menurut (Jouber & Fakhfakh, 2011) pada penelitian di perancis menjelaskan jumlah dewan komisaris yang banyak mempunyai dampak yang baik terhadap perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal (Makhdalena, 2011).

Sesuai ketentuan OJK, jumlah minimal komisaris independen di perseroan publik adalah 30% dari semua anggota dewan komisaris dan menyatakan diri independen dalam RUPS. Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan regulasi untuk standar acuan Good Corporate Governance dalam membentuk dewan komisaris yang efektif, dewan komisaris terdiri dari tidak kurang dari tiga anggota, dan mereka mayoritas independen. Artinya paling sedikit satu komisaris independen dan paling sedikit dua anggota lainnya berasal dari luar perseroan. Tujuan dewan komisaris dari pihak independen di luar perusahaan harus terdiri dari individu - individu yang mandiri dan tidak terlibat dalam tugas untuk pengelolaan harian aktivitas perusahaan serta mempunyai pengalaman yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif (Gunawijaya, 2015). Menurut (Darmadi & Gunawan, 2013) komisaris independen mampu melakukan pengawasan yang efektif dan melindungi kepentingan pemegang saham.

7. Kompetensi Dewan Komisaris

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2014) bahwa kompetensi yang dimiliki oleh dewan komisaris mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai kesuksesan sebuah perusahaan.

Untuk memperoleh dewan komisaris yang kompeten, perusahaan harus mengetahui informasi mengenai dewan komisaris tersebut serta memiliki kualifikasi tertentu dan pengalaman yang cukup untuk menjadi dewan komisaris tersebut (Octosiva et al., 2018).

Dilihat dari kriteria *ASEAN Corporate Governance Scorecard*, keahlian dewan komisaris didasarkan pada pengalaman dalam industri dan apakah memiliki pengalaman dalam industri tersebut. Pada penelitian sebelumnya belum banyak ditemukan dan mendefinisikan kompetensi serta pengalaman industri pada dewan komisaris tersebut. Latar belakang pendidikan bidang akuntansi dan keuangan sangat penting bagi dewan komisaris. Maka dari itu, kompetensi dewan komisaris yang cukup baik menguntungkan stakeholder dalam menganalisis laporan keuangan sehingga kemampuan dewan komisaris tersebut dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*.

8. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 31 menjelaskan bahwa rapat wajib dewan komisaris wajib dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan harus dihadiri mayoritas anggota dewan komisaris, serta

dewan komisaris wajib untuk melaksanakan rapat berkala bersama direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan dan kehadiran anggota dewan komisaris pada saat rapat wajib diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan public atau emiten.

Efektivitas peran dewan komisaris dalam proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan rutin serta pertemuan secara teratur dan terorganisir dengan baik dapat membantu dewan komisaris dalam pengawasan serta lebih mampu mengkritik yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan manajemen (Zahra et al., 2016). Maka dapat disimpulkan, semakin banyak frekuensi rapat yang dilakukan dewan komisaris maka informasi terjadinya *financial distress* juga akan semakin cepat diketahui.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk menguji hubungan karakteristik dewan komisaris terhadap *Financial Distress*.

Tabel II.
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti & Tahun Penelitian	Variabel & Studi Kasus	Hasil Penelitian
-----------	---	-----------------------------------	-------------------------

1.	<p>The Effectiveness of Monitoring Mechanisms for Constraining Earnings Management: A Literature Survey for a Conceptual Framework. (Saleem et al., 2016)</p>	<p>Variabel : Board size (X1), Board independence (X2), CEO duality (X3), Board meeting (X4), Audit committee size (X5), Audit committee independence (X6), Audit committee meeting (X7), Ownership concentration (X8), Institutional ownership (X9), Audit size (X10), Audit fee (X11). Studi Kasus : Review literature and Evidence from previous studies supports the proposed model</p>	<p>X1 = Berpengaruh terhadap Y X2 = Berpengaruh terhadap Y X3 = Berpengaruh terhadap Y X4 = Berpengaruh terhadap Y X5 = Berpengaruh terhadap Y X6 = Berpengaruh terhadap Y X7 = Berpengaruh terhadap Y X8 = Berpengaruh terhadap Y X9 = Berpengaruh terhadap Y X10 = Berpengaruh terhadap Y X11 = Berpengaruh terhadap Y</p>
2.	<p>The Effect of Board Independence on Information Asymmetry. (Goh et al., 2014)</p>	<p>Variabel : Greater board independence (X1), Greater board independence (X2a), Greater board independence (X2b), Management</p>	<p>X1 = Berpengaruh terhadap Y X2a = Berpengaruh terhadap Y</p>

		forecast frequency (X2c). Studi kasus : all firms in the Riskmetrics database for which Board independence can be computed.	X2b = Berpengaruh terhadap Y X2c = Berpengaruh terhadap Y
3.	The effects of corporate governance on performance and financial distress: The experience of UAE national banks. (Hassan Al-Tamimi, 2012)	Variabel : Corporate Governance practices (X1), Corporate Governance practices (X2), Corporate Governance practices (X3), Corporate Governance practices (X4). Studi Kasus : UAE national banks.	X1 = Berpengaruh terhadap Y X2 = Tidak berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y X4 = Tidak berpengaruh terhadap Y
4.	Underpricing, board structure, and ownership An empirical examination of Indonesian IPO firms. (Darmadi & Gunawan, 2013).	Variabel : Board Size (X1), board independence (X2), ownership concentration (X3), institutional ownership (X4). study consists of all firms that conducted IPOs in the country's primary equity market from 1 January 2003 to 31 July 2011. Resulting in 101 firms meeting our selection criteria.	X1 = Berpengaruh terhadap Y X2 = Berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y X4 = Berpengaruh terhadap Y
5.	Board Characteristics and Firm	Variabel : board of directors (X1), the board of	X1 = Tidak berpengaruh terhadap Y

	<p>Performance: Evidence from Indonesia. (Hidayat & Utama, 2016).</p>	<p>commissioners (X2), independent commissioners (X3), ex-government officer in the board of commissioners (X4), Larger board size (X5). Studi Kasus : all listed companies in the Indonesian Stock Exchange. We limit the sample to companies which have audited financial statements and annual reports for a 5 year research period (2008-2012) and have information on the board of commissioners and directors' profile,</p>	<p>X2 = Tidak berpengaruh terhadap Y X3 = Berpengaruh terhadap Y X4 = Tidak berpengaruh terhadap Y X5 = Berpengaruh terhadap Y</p>
6.	<p>Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go Public Indonesia. (Andarini & Januarti, 2012)</p>	<p>Variabel : Komisaris Independen (X1), Ukuran dewan (X2), Reputasi Auditor (X3), Kompleksitas Bisnis (X4), Risiko Pelaporan Keuangan (X5), Leverage (X6), Ukuran Perusahaan (X7). Studi Kasus : seluruh perusahaan nonfinansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2007-</p>	<p>X1 = Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X2 = Tidak berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y X4 = Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X5 = Tidak berpengaruh terhadap Y</p>

		2008 yang telah mempublikasikan laporan tahunannya.	X6 = Tidak berpengaruh terhadap Y X7 = Berpengaruh terhadap Y
7.	Karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba: Bukti pada peristiwa penawaran saham perdana. (Setiawan, 2018).	Variabel : Ukuran dewan (X1), Komisaris Independen (X2), Komisaris Wanita (X3), Umur Anggota Dewan Komisaris (X4), Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris (X5). Studi Kasus : perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada periode 2001 – 2016. Perusahaan tersebut tidak termasuk perusahaan yang terdaftar di industri keuangan.	X1 = Berpengaruh terhadap Y X2 = Tidak berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y X4 = Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X5 = Tidak berpengaruh terhadap Y
8.	Pengaruh karakteristik komite audit, independensi dewan komisaris, reputasi auditor terhadap financial distress. (Gunawijaya, 2015).	Variabel : Jumlah Komite Audit (X1), Independensi Dewan Komisaris (X2), Frekuensi rapat Komite Audit (X3), Keahlian Keuangan atau Akuntansi Anggota Komite Audit (X4), Reputasi auditor (X5).	X1 = Berpengaruh terhadap Y X2 = Tidak berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y X4 = Tidak berpengaruh signifikan terhadap Y

		Studi Kasus : perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.	X5 = Berpengaruh terhadap Y
9.	Pengaruh independensi, kompetensi dan partisipasi dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan. (Octosiva et al., 2018).	Variabel : Independensi Dewan Komisaris (X1), Kompetensi Dewan Komisaris (X2), Partisipasi Dewan Komisaris (X3). Studi Kasus : semua perusahaan yang memiliki data independensi, kompetensi, dan partisipasi dewan komisaris dari tahun 2011-2015 serta informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang diprosikan dengan ROA di BEI.	X1 = Tidak berpengaruh terhadap Y X2 = Berpengaruh terhadap Y X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y
10.	Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba. (Prastiti & Meiranto, 2013)	Variabel : Ukuran Dewan Komisaris (X1), Independensi Dewan Komisaris (X2), Keahlian Keuangan Dewan Komisaris (X3), Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (X4), Ukuran Komite Audit (X5), Independensi Komite Audit (X6), Keahlian Keuangan	X1 = Berpengaruh terhadap Y. X2 = Berpengaruh terhadap Y. X3 = Tidak berpengaruh terhadap Y. X4 = Tidak berpengaruh terhadap Y. X5 = Tidak berpengaruh terhadap Y. X6 = Tidak berpengaruh terhadap Y.

		Komite Audit (X7), Frekuensi Pertemuan Komite Audit (X8).	X6 = Berpengaruh terhadap Y. X7 = Tidak berpengaruh terhadap Y. X8 = Tidak berpengaruh terhadap Y.
--	--	--	--

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Prediksi *Financial Distress*

Menurut *teori keagenan*, dewan komisaris merupakan bagian dari pengendalian internal tertinggi, bertanggung jawab mengontrol perilaku manajemen puncak dan ukuran dewan komisaris dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang baik (Prastiti & Meiranto, 2013). Menurut PJOK Nomor 55/PJOK.04/2015 dewan komisaris perlu membentuk komite audit untuk membantu kinerjanya serta bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Menurut (Saleem et al., 2016) bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan mempunyai hubungan dengan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Saleem et

al., 2016) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dapat mengurangi kesalahpahaman dan masalah terkait pelaporan keuangan serta hal ini mempunyai hubungan karena dapat meminimalisir terjadinya *financial distress*.

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis berpendapat bahwa jumlah atau ukuran dewan komisaris dapat meningkatkan kinerja serta pengawasan yang dilakukan secara efektif. Maka penulis dapat merumuskan hipotesis :

H1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*

2. Pengaruh Komisaris independen terhadap Prediksi *Financial Distress*

Menurut *teori keagenan*, diperlukan komisaris independen untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku direksi mengenai perilaku oportunistik mereka (Jensen & Meckling, 1976). Teori Agensi berpendapat bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin efektif mereka dapat menjalankan tugasnya mengawasi dan mengontrol perilaku direktur eksekutif. Komisaris independen yang lebih besar mengarah pada keberadaan perusahaan lebih transparan dan dapat mengurangi asimetri informasi diantara investor (Goh et al., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Goh et al., 2014) menyatakan keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap transparansi perusahaan serta kontrol terhadap manajemen perusahaan yang mampu mengurangi resiko terjadinya *financial distress*. Hal ini sesuai dengan teori agensi bahwa risiko *financial distress* dapat ditekan dengan adanya kontrol dan pengendalian terhadap tindakan manajemen.

Pada uraian diatas penulis berpendapat bahwa dengan adanya dewan komisaris yang independen dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder dan berdampak pada tingginya tingkat investasi sehingga dapat meminimalkan terjadinya *financial distress* (Gunawijaya, 2015). Maka penulis dapat merumuskan hipotesis :

H2 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*.

3. Pengaruh Kompetensi Dewan Komisaris terhadap Prediksi *Financial Distress*

Menurut *teori keagenan*, untuk menimalisir terjadinya perbedaan informasi antara stakeholder dan manajemen maka penting adanya dewan komisaris sebagai fungsi pengawasan

yang sudah memiliki legalitas dan keilmuan melalui jenjang pendidikan serta pengalaman kerja yang sudah digeluti (Gunawijaya, 2015).

Fungsi dewan komisaris adalah sebagai pengawas dan penasehat tetapi tidak akan bertindak sebagai pengambil keputusan operasional karena pengambilan keputusan operasional adalah tanggung jawab direksi. Dewan komisaris diharapkan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan dengan demikian efektivitas fungsi pengawasan dapat lebih ditingkatkan (Prastiti & Meiranto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Octosiva et al., 2018) bahwa dewan komisaris dengan tingkat keahlian yang tinggi dapat meningkatkan kinerja keuangan pada perusahaan serta dapat meminimalkan risiko terjadinya *financial distress*.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Prastiti & Meiranto, 2013) dan (Octosiva et al., 2018) menemukan bahwa kompetensi pada dewan komisaris mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris yang berdampak pada kinerja keuangan dan pelaporan yang dilakukan manajemen. Maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut juga dapat meminimalkan *financial distress* pada perusahaan dikarenakan keahlian akuntansi pada dewan komisaris dapat mengatasi, menganalisis,

dan memahami masalah yang timbul dalam laporan keuangan.

Maka penulis dapat merumuskan hipotesis :

H3 : Kompetensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap prediksi *financial distress*

4. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap Prediksi *Financial Distress*

Rapat dewan komisaris adalah hal penting dalam melakukan pengendalian dan pengawasan. Rapat dewan komisaris merupakan wadah komunikasi dan koordinasi kedua belah pihak dalam menjalankan tugasnya mengawasi manajemen. Pada pertemuan tersebut membahas arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diadopsi oleh manajemen, dan menyelesaikan konflik kepentingan (Prastiti & Meiranto, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Zahra et al., 2016), pertemuan rutin yang dilakukan dewan komisaris dapat meningkatkan efektivitas serta peran pengawasan atas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal.

Dari pandangan teori keagenan bahwa jumlah pertemuan dapat dijadikan dasar sebagai proksi waktu yang digunakan

dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan monitoring terhadap persiapan pelaporan yang dapat meminimalkan (Zahra et al., 2016) risiko terjadinya *financial distress* pada perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zahra et al., 2016) menyatakan tidak terdapatnya pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris karena pada pertemuan rutin hanya dijadikan sebagai formalitas tidak membahas secara detail. Maka penulis dapat merumuskan hipotesis :

H4 : Frekuensi pertemuan dewan komisaris positif berpengaruh terhadap prediksi *financial distress*

D. Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada pembahasan hipotesis yang telah disebutkan sebelumnya, kerangka konseptual yang dapat menggambarkan hubungan antar variabel dalam penelitian ini, adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen yaitu *financial distress*. Maka dapat digambarkan kerangk konseptual sebagai berikut :

Gambar I.
Kerangka Konseptual

Variabel Independen

Ukuran Dewan
Komisaris

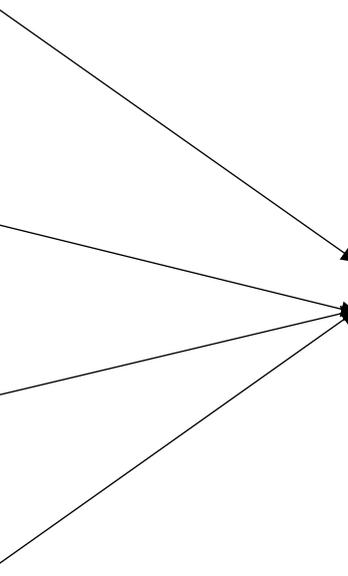
Komisaris
Independen

Kompetensi Dewan
Komisaris

Frekuensi
Pertemuan Dewan
komisaris

Variabel

Financial Distress



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris (X_1) tidak memiliki pengaruh terhadap Prediksi *Financial Distress* (Y) pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2015 – 2019.
2. Komisaris Independen (X_2) memiliki pengaruh terhadap Prediksi *Financial Distress* (Y) pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2015 – 2019.
3. Kompetensi Dewan Komisaris (X_3) memiliki pengaruh terhadap Prediksi *Financial Distress* (Y) pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2015 – 2019.
4. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris (X_4) memiliki pengaruh terhadap Prediksi *Financial Distress* (Y) pada perusahaan BUMN di Indonesia tahun 2015 – 2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pada perusahaan BUMN seharusnya memiliki dewan komisaris yang berkompeten dalam bidangnya dan lebih meningkatkan komisaris independen yang terlepas dari rangkap jabatan untuk menghindari adanya

konflik kepentingan serta intervensi terhadap ke Independenan tersebut. Namun disisi lain frekuensi pertemuan yang dilakukan dewan komisaris harus efektif dan optimal, maka dari itu perlu adanya kompetensi yang mumpuni serta independensi untuk menjaga kelangsungan perusahaan dan mencegah *financial distress*.

B. Keterbatasan

1. Tahun penelitian hanya sampai tahun 2019 sedangkan ada beberapa perusahaan sudah memiliki annual report tahun 2020.
2. Sampel pada penelitian ini hanya pada perusahaan BUMN, sedangkan banyak perusahaan swasta atau sektor lainnya.
3. Penelitian ini hanya fokus pada variabel *Good Corporate Governance* dan *financial distress*.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mempunyai saran agar pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini.

Adapun saran – saran lainnya yaitu :

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian sampai tahun 2020 atau tahun terbaru *annual report* diterbitkan perusahaan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mencoba untuk meneliti sektor lain seperti pertambangan, manufaktur, dan perbankan serta sektor lain yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti variabel lain seperti, karakteristik dewan direksi, remunerasi dewan komisaris, *political connection* dewan komisaris atau direksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmyga, S. F., & Mita, A. F. (2015). Pengaruh Struktur Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Luas Pengungkapan Kompensasi Manajemen Kunci Di Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 19–36. <https://doi.org/10.21002/jaki.2015.02>
- Ananto, R. P., Mustika, R., & Handayani, D. (2017). Pengaruh GCG, Leverage, Profitabilitas Dan UP Terhadap Financial Distress (Pada Perusahaan Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 19(1), 92–105.
- Andarini, P., & Januarti, I. (2012). Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris Dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go Public Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 83–99. <https://doi.org/10.21002/jaki.2012.06>
- Ardian, andre vici, Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Leverage, Rasio Aktivitas dan Rasio Profitabilitas Terhadap Financial Distress (pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2015). *Jurnal Ekonimika Bisnis*. https://doi.org/10.20594/religionandsociety.21.0_162
- ASEAN Corporate Governance Scorecard*. (2017). 1(May), 13–14.
- Bregiba, Y., Br, L., & Laksito, H. (2016). Pengaruh efektifitas komite audit terhadap financial distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2014). *Diponegoro Journal of Accounting*, 5(2), 1–11.
- Chrissentia, T., & Syarief, J. (2018). Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Firm Age, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress. *Simak*, 16(01), 45–62. <https://doi.org/10.35129/simak.v16i01.11>
- Cinantya, I. G. A. A. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2015). Pengaruh Corporate Governance, Financial Indicators dan Ukuran Perusahaan pada Financial Distress. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(3), 897–915.
- Damayanti, L. D., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2017). Analisis pengaruh kinerja keuangan, Ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap prediksi financial distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015). *JIMAT Undiksha*, 7(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/9675/6147>
- Darmadi, S., & Gunawan, R. (2013). Underpricing, board structure, and ownership: An empirical examination of Indonesian IPO firms. *Managerial Finance*, 39(2), 181–200. <https://doi.org/10.1108/03074351311294016>
- Ervina, talenta. c. (2019). *Pentingnya BUMN Hadir untuk Membantu Perkembangan Negeri*. Talenta.Co. <https://www.talenta.co/blog/insight->

talenta/badan-usaha-milik-negeri/

- Ferbienti, F., Indra, Z. A., & Nauli, P. (2018). Pengaruh Struktur Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, dan Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. *The Journal of Accounting and Finance*, 23(2), 187–200.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2002). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. II, 1–36.
- Goh, B. W., Lee, J., Ng, J., & Ow Yong, K. (2014). The Effect of Board Independence on Information Asymmetry. *European Accounting Review*, 25(1), 155–182. <https://doi.org/10.1080/09638180.2014.990477>
- Gunawijaya, I. N. A. (2015). Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Independensi Dewan Komisaris, Reputasi Auditor Terhadap Financial Distress. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 2015(27), 1–239.
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Hantono, . (2019). Memprediksi Financial Distress Dengan Menggunakan Model Altman Score, Grover Score, Zmijewski Score (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22372.2019>
- Hartono, D. F., & Nugrahanti, Y. W. (2014). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 3(2), 191–205.
- Hassan Al-Tamimi, H. A. (2012). The effects of corporate governance on performance and financial distress: The experience of UAE national banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 20(2), 169–181. <https://doi.org/10.1108/13581981211218315>
- Haziro, A. L., & Negoro, N. (2017). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Financial Distress Perbankan Indonesia. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 32–36.
- Hidayat, A. A., & Utama, S. (2016). Board Characteristics and Firm Performance: Evidence from Indonesia. *International Research Journal of Business Studies*, 8(3), 137–154. <https://doi.org/10.1111/acfi.12308>
- Huljanna, M. (2019). *Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Financial Distress (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014–2017)*. In skripsi, 1–65.
- Idris, M., & Kompas.com. (2019). *Daftar 7 BUMN yang Tetap Rugi Meski Sudah Disuntik PMN*. [Www.Kompas.Com](http://www.kompas.com).

<https://money.kompas.com/read/2019/12/21/142657926/daftar-7-bumn-yang-tetap-rugi-meski-sudah-disuntik-pmn>

- Ilmi, A. B., Norita, & Firli, A. (2016). Analisis Financial Distress dengan Menggunakan Metode Altman, Ohlson, dan Fulmer untuk Memprediksi Kebangkrutan Serta Kesesuaian dengan Opini Auditor (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-20). *Sosiohumanitas*, 18(2), 11–30.
- Indrayati, M. R. (2010). Pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap tingkat konservatisme akuntansi. *In Skripsi*.
- Jensen, michael c, & Meckling, william h. (1976). Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Jouber, H., & Fakhfakh, H. (2011). Earnings management and board oversight: An international comparison. *Managerial Auditing Journal*, 27(1), 66–86. <https://doi.org/10.1108/02686901211186108>
- Loman, R. K., & Kunci, K. (2015). *Determinan terhadap prediksi*. 15(2), 371–381.
- Makhdalena. (2011). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Komposisi Komite Audit Terhadap Internal Control. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(1), 1–14.
- Masak, F., & Noviyanti, S. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 237. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21002>
- Mueller, D. C. (2018). Corporate Governance and Neoclassical Economics. *International Journal of the Economics of Business*, 25(1), 47–64. <https://doi.org/10.1080/13571516.2017.1374038>
- Nasri, R., Aini, N., Jakarta, M., Kh, J., Dahlan, A., & Selatan, J. (2018). *Pengukuran Financial Distress dengan Model Foster , Grover dan Ohlson (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate)*.
- Octosiva, F., Theresia, M., & Hidayat, A. A. (2018). Pengaruh Independensi, Kompetensi, Dan Partisipasi Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 158–203. <https://doi.org/10.21632/saki.1.2.158-203>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK. 04/2014. *Ojk.Go.Id*, 1–21.
- Prastiti, A., & Meiranto, W. (2013). *Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba*. 2, 1–12.
- Putra, R., & Serly, V. (2020). Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress (Studi Empiris Pada Perusahaan

- BUMN Di Indonesia Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 3160–3178. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/27>
- Saleem, F., Alifiah, M. N., & Tahir, M. S. (2016). The effectiveness of monitoring mechanisms for constraining earnings management: A literature survey for a conceptual framework. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(3), 209–214.
- Santoso, S. (2016). *Panduan lengkap SPSS versi 23* (1st ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Setiawan, D. (2018). Karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba: bukti pada peristiwa penawaran saham perdana. *Jurnal Siasat Bisnis*, 22(2), 164–181. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol22.iss2.art4>
- Sugiyono, P. D. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sulastri, E., & Zannati, R. (2018). Prediksi financial distress dalam mengukur kinerja perusahaan manufaktur. *Jurnal Manajemen Strategi Dan Aplikasi Bisnis*, 1(1), 27–36. <https://doi.org/10.36407/jmsab.v1i1.17>
- Suparjo, R, O. co. (2021). *Daftar BUMN yang Terlilit Utang Rp1.682 Triliun*. www.okezone.com.
<https://economy.okezone.com/read/2021/02/01/320/2354465/daftar-bumn-yang-terlilit-utang-rp1-682-triliun?page=1>
- Susetyo, D. P., & Ramdani, S. H. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT.Bank Mandiri Persero,Tbk. *Jurnal Ekonomedia*, 9(1), 38–51.
- Zahra, F., Pratomo, D., & Dillak, V. (2016). Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, dan Frekuensi Rapat Dewan Komisaris Terhadap Profitabilitas. *E-Proceeding of Management*, 3(3), 3324.
- Zainuddin, aisyah ulfah. (2019). Pengaruh efektivitas komite audit terhadap financial distress (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). *In Skripsi*.